

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (*akuntability*) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya. Akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

Asas akuntabilitas menurut Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, upaya pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, namun perbaikan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Palembang tergolong masuk kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi BPK masih menemukan berbagai permasalahan di kota Palembang. Dalam Sosialisasi

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ir. Isma Yatun, M.T., mengajak pemkot dan DPRD kota Palembang untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Opini BPK di pemkot Palembang tergolong bagus tetapi BPK masih menemukan permasalahan seperti pengelolaan kas, pengelolaan aset tetap, pengelolaan piutang dan pengelolaan pendapatan. BPK juga masih menemukan aset tetap yang dicatat secara gabungan dan tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain. “Saya berharap agar pemkot Palembang dapat meningkatkan komitmen dan bekerja keras, dengan bersinergi dalam menjalankan tugas oleh masing-masing pihak, “himbauanya. <https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/>

Tabel 1.1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Palembang

Tahun	Opini BPK
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data yang diolah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2019

Berita lain mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa seluruh Pemerintah daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Tetapi dalam hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah yang masih perlu mendapat perhatian sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018 yang telah disampaikan, ungkap Anggota V BPK. <https://www.bpk.go.id/news/pengelola-keuangan-negara-daerah-dituntut-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas>

Adanya pemberitaan tersebut memberikan gambaran bahwa masih kurangnya akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 pasal 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diwajibkan kepada setiap kepala daerah untuk mengelola Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017). Sedangkan menurut Mustofa (2012) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk

meyearluaskan informasi publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan internet.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah diperlukan komitmen organisasi yang kuat. Sumber daya manusia suatu organisasi atau pemerintah yang bagus tidak akan berjalan secara maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik tanpa adanya komitmen organisasi di dalamnya. Komitmen organisasi yang menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Dengan komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai yang diharapkan.

Dika Kurniawan, Sri Rahayu (2018) dan Miftahul Reza Fauziya, Nur Handayani (2017) memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan menambah variabel Komitmen Organisasi serta lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.

Menanggapi fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel dengan fenomena yang ada saat ini dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD Kota Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD kota Palembang ?
2. Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD kota Palembang ?
3. Bagaimana Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD kota Palembang ?
4. Bagaimana pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD kota Palembang.

2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat daerah yaitu Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan tipe A yang di bentuk untuk mewedahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan keuangan daerah OPD kota Palembang.
2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan keuangan OPD kota Palembang.
3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD Kota Palembang
4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah OPD Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang.
2. Bagi akademisi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam memahami penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD kota Palembang.